

Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Talamau

Wafda¹, M. Fahri Adnan²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: wafdapatabahroha1109@gmail.com, fachri.adnan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari pada peristiwa gempa bumi pada Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat pada 25 Februari 2022 yang menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa sebanyak 336 luka ringan, 45 luka berat dan 11 orang meninggal dunia. Melihat masih banyaknya korban jiwa akibat bencana menjadi pertanda masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir akibat bencana yang dapat terjadi maka dibutuhkan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Penelitian yang terlaksana tujuannya yakni untuk mendeskripsikan peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kesiapan serta kesiagaan masyarakat saat bencana gempa bumi. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif menggunakan metodologi deskriptif dan metode dalam mengumpulkan datanya berupa wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Informan di dalamnya ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan metode analisis datanya peneliti gunakan model analisis interaktif okeh Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan ditentukan dengan menggunakan 4 indikator menurut UU No 24 Tahun 2007 perihal penanggulangan bencana telah berhasil dilaksanakan. Tidak cukupnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana serta lemahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat menjadi penghambat usaha BPBD Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Kata kunci: *Peran, BPBD dan Kesiapsiagaan*

Abstract

This research is based on the earthquake in Talamau District, West Pasaman Regency on February 25, 2022, which caused 336 minor injuries, 45 serious injuries and 11 people died. Seeing that there are still many casualties due to disasters is a sign that the community's preparedness in dealing with earthquakes is still low. Therefore, to minimize the consequences of disasters that can occur, systematic, integrated and coordinated handling is needed. The purpose of this research is to describe the role of the West Pasaman Regency BPBD to improve the readiness and preparedness of the community during an earthquake disaster. This research is a qualitative research using descriptive methodology and methods

in collecting data in the form of interviews, observation and documentation studies. The informants in it were determined using purposive sampling technique, and the data analysis method used an interactive analysis model by Miles and Huberman (1994). The results of the study explain that the role of BPBD in improving preparedness is determined using 4 indicators according to Law No. 24 of 2007 regarding disaster management has been successfully implemented. Insufficient human resources, budget, infrastructure and weak community participation in West Pasaman Regency are obstacles to the efforts of BPBD West Pasaman Regency to improve community preparedness..

Keywords : *Peran, BPBD and Preparedness*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia selain menjadi negara dengan sumber daya alam yang kaya juga menjadi salah satu wilayah dengan risiko tinggi akan terjadinya bencana. hal ini disebabkan karena dinamika geografis, demografis dan klimatologis Indonesia. Indonesia dari segi geografisnya berada terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik dunia yakni lempeng Benua Australia dan Asia, serta lempeng Samudera pasifik dan hindia. Berdasarkan posisi Indonesia diatas menjadikan Negara Indonesia sering mengalami bencana terutama peristiwa atau kejadian gempa bumi.

Bencana ialah sebuah kejadian yang mengakibatkan timbulnya ancaman serta menyebabkan masyarakat terganggu atas adanya faktor alam maupun non alam, dan dengan demikian bisa membuat jatuhnya korban jiwa, berdampak pada aspek psikis, rusaknya lingkungan, serta kehilangan harta benda (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana). Bencana gempa bumi ialah guncangan serta getaran yang terjadi pada permukaan bumi karena pelepasan energi dari dalam bumi yang secara tiba – tiba terjadi. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas pergerakan bumi ataupun terjadinya patahan aktif akibat aktivitas gunung api. Karakter bencana gempa bumi yang tak bisa diperkirakan membuatnya wajib untuk diwaspadai (Kurniati, rivani risha dan Merry sunaryo. 2023).

Pulau Sumatera menjadi salah satu daerah pada negara Indonesia yang rentan untuk terjadi gempa bumi. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satunya. Berada pada bagian barat sumatera yang banyak terdapat sesar aktif salah satunya sesar mentawai menjadikan Sumatera Barat sebagai wilayah rentang terhadap bencana gempa bumi. Catatan peristiwa gempa bumi 30 September 2009 Sumatera Barat menjadi sejarah kebencanaan gempa bumi dengan kerugian besar yang terjadi di Indonesia. hal ini sebagai akibat karena posisi geografis Provinsi Sumatera Barat yang berada di jalur Sirkum Fasifik busur api (*Ring Of Fire*) dan zona zuduksi Megathrust Mentawai. Bencana alam dianggap sebagai kejadian yang biasa serta masuk dalam berita di Indonesia bahkan dunia setiap harinya. Beragam bencana yang terjadi berdampak pada kerugian yang sifatnya materil ataupun moril (heryati, Sri. 2020).

Diantara 19 Kabupaten Provinsi Sumatera Barat terdapat Kabupaten Pasaman Barat yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi karena berada pada pertemuan dua patahan besar Lempeng Eurasia dan Australia dengan jalur patahan semangko besar.

Bencana gempa bumi 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat menjadi peristiwa bencana berdampak besar yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Talamau. Sebagai pusat terjadinya gempa, Kecamatan Talamau menjadi daerah terdampak paling parah. Secara geografis Kecamatan Talamau terletak pada 00°04' - 00°18' LU dan 99°51' - 100°04' BT dengan luas wilayah 324,24 Km². Dengan skala magnitudo 6,2 Skala Richter gempa ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa terhadap masyarakat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Dijelaskan oleh BeritaSatu.com gempa bumi ini telah menimbulkan kerusakan sebanyak 4.831 rumah rusak, 21 unit fasilitas pendidikan, 13 fasilitas kesehatan, 39 tempat ibadah, 17 kantor pemerintahan dan 26 pada infrastruktur. Berdasarkan pusat data posko utama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 menjelaskan gempa ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 336 orang luka ringan, 45 luka berat dan 11 orang meninggal dunia.

Tabel 1. Sebaran Kerusakan Sarana Dan Prasarana

Kecamatan	Rumah	Faspen	Faskes	Rumah Ibadah	Infrastruktur	Perkantoran	Total
Kec. Gn. Tuleh	2	-	1	-	-	1	4
Kec. Talamau	1.215	26	10	26	15	5	1.297
Kec. Pasaman	691	25	6	13	2	34	771
Kec. Luhak Nan Duo	5	-	-	-	-	1	6
Kec. Kinali	1111	24	1	1	9	1	1147

Sumber: Olahan penulis dari pusat data posko utama 2022 Pasbar

Melihat besarnya dampak akibat bencana, maka upaya penanganan bencana untuk meminimalisir akibat bencana sangat perlu dilakukan. Tingginya kerusakan dan korban jiwa akibat bencana yang meninggal dunia menjadi pertanda bahwa masih lemahnya kesiapsiagaan masyarakat. Sebagaimana Setyaningrum & Setyorinit (2020) mengatakan bahwa minimnya kesiapan masyarakat terkait pengantisipasi bencana menjadi penyebab utama banyaknya orang yang meninggal dunia/tewas akibat bencana.

Hasil observasi penulis menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Talamau tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap ancaman risiko bencana. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Talamau, sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang ancaman yang ada, sehingga pada saat terjadi bencana banyak masyarakat yang panik berlebihan untuk menyelamatkan diri. Minimnya kapasitas masyarakat untuk memahami bahaya, respon atau tindakan masyarakat terhadap bencana gempa bumi menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa karena ketidaksiapan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana (Rahmi, Afzahul. Dkk. 2021).

Oleh karena itu, ini adalah tugas dari BPBD Kabupaten Pasaman Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai penanggulangan bencana di Pasaman Barat untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan masyarakat sehubungan akan terjadinya

gempa bumi yang tidak dapat diprediksi salah satunya adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Kesiapsiagaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Kesiapsiagaan ialah sekumpulan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi bencana dengan pengorganisasian disertai beragam langkah yang berdaya guna serta tepat guna. Selanjutnya kesiapsiagaan menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) ialah berbagai tindakan yang memberi peluang pada organisasi, pemerintah, komunitas, masyarakat, serta individu supaya dapat menanggapi sebuah kondisi bencana dengan tepat serta tepat guna. Kesiapsiagaan bisa berbentuk fisik serta non-fisik. Aktivitas fisik misalnya tindakan memanfaatkan lahan serta menyediakan tempat evakuasi sedangkan non fisik misalnya mempelajari gejala alam dalam rangka mencari tahu berbagai pertanda kedatangan bencana hingga mengingatkan satu sama lain supaya siaga dalam menghadapi bencana.

Namun dalam tinjauan lapangan peneliti peran dari BPBD Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pertama, masalah seperti minimnya sosialisasi yang dilatksanakan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana, serta belum terciptanya rute evakuasi serta titik aman evakuasi sehingga masyarakat kesulitan pada saat terjadi bencana.

Peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting dilakukan, mengingat masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana. Untuk Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Peristiwa bencana alam terutama fempa bumi sepenuhnya tidak bisa kita hilangkan, tetapi dampak yang ditimbulkan akibat bencana sesungguhnya dapat dikurangi (Sudirman, Kessi Deajeng dan Zikri alhadi, 2020). Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin melihat bagaimana Peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Dengan pendekatan kualitatif menggunakan metodologi deskriptif penelitian ini dilakukan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, spesifiknya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat terhadap peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi di Kecamatan Talamau. Peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya ialah obeservasi, wawancara, serta dokumentasi dalam mengumpulkan datanya. Sementara analisis data peneliti lakukan dengan metode kualitatif yang berbentuk deskriptif menggunakan reduksi data, data yang disajikan serta penarikan kesimpulannya peneliti dasarkan pada Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 perihal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berisi yakni aktivitas kesiapsiagaan menjadi bentuk tanggung jawab pihak pemerintah daerah dan pusat serta diselenggarakan dengan

cara bersama-sama dengan lembaga usaha ataupun masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat ialah pemerintah daerah yang dimaksud penulis sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat.

Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi

Dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana gempa bumi membutuhkan peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat selaku lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah aktivitas yang dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya peran secara terminology merupakan seperangkat tingkah yang oleh orang yang punya kedudukan di masyarakat. Sedangkan peran menurut Mertong dalam (Sekartaji, Dyah Ningrum. Dkk. 2022) mengatakan bahwa peran ialah bentuk kelakuan yang diinginkan masyarakat dari seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai status.

Menurut Soejono Soekanto (2012:212) ialah aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya jika seorang individu ataupun sekelompok orang memberikan hak serta kewajibannya berdasarkan status yang dia miliki maka dia telah menjalankan peran. Untuk melihat peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 indikator yang penulis gunakan mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 perihal penanggulangan bencana.

a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana.

Peran BPBD Dalam memberikan pedoman dan pengarahan adalah aspek penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pemberian pedoman dan pengarahan bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam mengantisipasi risiko terjadinya bencana. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan pedoman dan pengarahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan kapasitas kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana gempa bumi yang ada. Terkait pedoman dan pengarahan masyarakat dihimbau untuk mengambil tindakan sebelum terjadinya bencana diantaranya untuk memperhatikan ketahanan perabot rumah tangga dengan mengikat/memaku perabot tersebut seperti lemari dan lainnya agar tidak jatuh/robokh ketika terjadi gempa, memastikan ketahanan benda yang tergantung di dalam rumah seperti lampu karena dapat jatuh ketika terjadi gempa. Selalu mematikan aliran listrik, gas, serta air ketika tak digunakan dan untuk bisa melakukan pertolongan perta sesama masyarakat.

Selain itu dalam pemberian pedoman dan pengarahan masyarakat kami edukasi untuk tidak panik dan selalu melindungi kepala dengan tangan atau benca lain, serta menjauhi jendela dan bangunan tinggi, berlindung di bawah meja ketika sedang di dalam rumah/gedung, dan berlari keluar dan berkumpul dititik yang ditentukan. Sejalan dengan tujuan kesiapsiagaan menurut IDEP 2007 kegiatan memberikan pedoman dan pengarahan dilakukan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ancaman.

b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana

Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mencapai keselarasan dalam memberikan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Pasaman Barat menggunakan standar LIPI-UNESCO 2006 sebagai standardisasi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Terdapat 5 variable yang ditetapkan, yaitu:

a) Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana

Dalam kesiapsiagaan masyarakat pengetahuan menjadi kunci penting dalam kesiapsiagaan masyarakat. Pengetahuan yang masyarakat miliki akan berpengaruh terhadap sikap dan kepeduliannya dalam mengantisipasi bencana. Menurut Solway dalam (Heryati, Sri. 2020:143) menjelaskan memastikan semua anggota masyarakat memiliki kesadaran terhadap potensi bencana alam merupakan salah satu peran dari BPBD. Dalam hal ini berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, peran BPBD Kabupaten Masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap risiko bencana dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan pendidikan kebencanaan terhadap beberapa sekolah di Kecamatan Talamau. Kegiatan sosialisasi masyarakat berupa edukasi kepada masyarakat untuk memiliki kapasitas terkait bencana gempa bumi, dampak bencana gempa bumi, apa yang harus dilaksanakan saat gempa serta tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya pendidikan kebencanaan menjadi salah satu program yang telah dilwujudkan di beberapa Instansi pendidikan yang ada di Kecamatan Talamau sekaligus upaya untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kecamatan Talamau. Dengan tampilan video dan PPT menggunakan infokus materi disampaikan dan diberikan terkait bencana gempa bumi dan sikap menghadapinya.

Konsorium Pendidikan Bencana Indonesia (2011) dalam (Rifaldi, dkk. 2023) menjelaskan bahwa sekolah merupakan tempat kedua peserta didik dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu pengetahuan setelah dirumah. Oleh karena itu pendidikan kebencanaan akan melahirkan peserta didik yang berpengetahuan serta pemahaman tentang bencana secara tepat yang akan memberikan kesiapan untuk menghadapi bencana.

b) Kebijakan dan panduan

Tersedianya peraturan dan aturan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menjadi landasan bagi setiap organisasi maupun lembaga usaha serta masyarakat dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh tersedianya legislasi yang jelas. Berdasarkan hasil temuan peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman Barat bersama Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 perihal penanggulangan bencana. Sebagai bentuk implementasi BPBD Kabupaten Pasaman Barat membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari, melakukan pendidikan kebencanaan serta pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

c) Rencana Tanggap Darurat

Rencana tanggap darurat ialah aktivitas yang dilaksanakan dalam mempersiapkan hal-hal menuju masa tanggap darurat. Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat

pada variable rencana tanggap darurat dilakukan melalui kegiatan simulasi dan pelatihan kebencanaan. Kegiatan simulasi dilakukan di beberapa sekolah yang terdapat di Kecamatan Talamau diantaranya SDN 05 Talamau, SDN 06 Talamau dan SDN 07 Talamau. Simulasi dilakukan pada kegiatan pembelajaran berlangsung, lalu tiba-tiba sirine akan dibunyikan sebagai tanda datangnya gempa, oleh karena itu peserta didik akan dituntut untuk bertindak melakukan evakuasi sesuai dengan prosedur yang diberikan. Selanjutnya pelatihan kebencanaan dilakukan melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang akan memberikan informasi kepada masyarakat lainnya.

d) Sistem Peringatan Bencana

Dalam peringatan bencana akan memberikan informasi kepada masyarakat tanda-tanda peringatan bencana untuk meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana kurangnya informasi peringatan dini serta pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bencana menjadi sebab bencana dapat menimbulkan korban dan kerugian besar akibat bencana. Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam sistem peringatan bencana BPBD kabupaten Pasaman Barat diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi serta simulasi/latihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan. Selain itu BPBD Kabupaten Pasaman Barat bersama Kelompok Siaga Bencana (KSB) menghimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan sistem peringatan bencana yang bersumber tradisional seperti pemanfaatan pengeras suara masjid, memukul bedug atau bahkan tiang listrik.

e) Memobilisasi sumber daya

Tersedianya sumber daya yang dapat menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atau menjadi faktor penghambat BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Sumber daya dapat berupa tersedianya anggaran, sarana dan prasarana, kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dapat menjadi pendorong utama di balik keberhasilan organisasi. Oleh karena itu sangat penting sebuah organisasi bisa memperhitungkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan temuan peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman Barat pertama sangat terbatas terkait dengan anggaran, minimnya anggaran membuat kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat sering tidak terlaksana, selanjutnya terbatasnya ketersediaan alat-alat perlengkapan juga menjadi penghambat BPBD dalam penanganan bencana. Banyaknya peralatan yang rusak ringan hingga rusak berat membutuhkan pembaruan untuk menunjang aktivitas BPBD. Selain itu semua minimnya sumber daya yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat juga menjadi kendala BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Secara kuantitas terhitung SDM yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki jumlah sebanyak 56 orang. Disisi minimnya kuantitas yang ada hanya sebagian kecil dari total aparatur yang disertai dengan kemampuan untuk menanggulangi bencana. Sehingga jumlah 56 orang tersebut tak proporsional serta sebanding dengan banyaknya peristiwa bencana pada Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sarana prasarana yang kurang memadai
4. Partisipasi masyarakat, masih lemahnya keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Pasaman Barat. menghambat kegiatan-kegiatan BPBD yang akan dilaksanakan.

SIMPULAN

Dari hasil temuan tersebut peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tentukan melalui 4 Indikator sesuai pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan keapda sekolah di Kecamatan Talamau; (2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana disusun menggunakan 5 variable diantaranya a) pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan kebencanaan, b) kebijakan dan panduan dilaksanakan dengan menetapkan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan bencana sebagai landasan bagi organisasi, lembaga usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan penanganan bencana, c) rencana tanggap darurat dilakukan melalui kegiatan simulasi dan pelatihan kebencanaan, d) sistem peringatan bencana dilakukan melalui sosialisasi, simulasi dan pelatihan serta pemanfaatan peringatan bencana yang bersumber tradisional untuk memberikan informasi kepada masyarakat, e) Mobilisasi sumber daya dalam hal ini menjadi kendala pada BPBD yaitu minimnya anggaran, kurang memadainya sarana dan prasara yang tersedia, serta SDM yang kurang kompeten; (3) Menetapkan dan menginformasikan peta telah dilakukan dengan pembuatan peta risiko gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat dan kegiatan penginformasian dilakukan dengan sosialisasi; (4) Menetapkan prosedur tetap bencana dilaksanakan menyesuaikan dengan prosedur tetap bencana oleh BNPB. Adapun yang menjadi kendala BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yaitu (1) Masih minimnya anggaran BPBD Kabupaten Pasaman Barat; (2) Terbatasnya kuantitas serta kualitas sumber daya manusia ; (3) sarana dan prasarana kurang memadai, serta; (4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini ditulis sesuai dengan judul "Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi di Kecamatan Talamau" yang di bimbing oleh Bapak Prof. Drs. M. Fachi Adnan, M.Si, Ph.D serta mendapat arahan dan masukan dari Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA dan Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

Heryati, Sri. 2020. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 2, No. 2 Agustus 2020.

- Kurniati, Rivani Risha dan Merry Sunaryo. 2023. Sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi di SDN Sindangkasih III. Jurnal pengabdian kepada masyarakat Nusantara (JpkMN). Vol. 4 No.1 Maret 2023
- Perbup Pasaman barat No 85 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten pasaman barat
- Perda kabupaten pasaman barat no 4 tahun 2018 tentang penanggulangan bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana
- Rahmi, Afzahul, dkk. 2021. Edukasi Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Kota Padang Tahun 2021. Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan.
- Rifaldi, dkk. 2023. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menjalankan Program Satuan Aman Pendidikan Bencana (Studi Kasus BPBD Kabupaten Bantul). *Indonesian Journal Of environment and Disaster (IJED)*. Vol. 2, No. 1 April 2023
- Sekartaji, Dyah Ningrum. 2022. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Dalam Penanggulangan Bencana Alam. Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 3 No. 7 Desember 2022
- Sudirman, Kessy Deajeng dan Zikri Alhadi. 2020. Analisis Kesiapsiagaan Siswa Dalam Menghadapi Risiko Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administarasi Publik. Volumen 2 Nomor 3 Tahun 2020
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana